



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 86);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.

4. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
8. Klasifikasi adalah proses identifikasi katagori-katagori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
9. Klasifikasi keamanan arsip adalah katagori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
10. Klasifikasi akses arsip adalah katagori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
11. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
12. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
13. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
14. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
15. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
16. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
17. Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
18. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
19. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
- b. pengaturan akses arsip.

BAB IV SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

Pasal 6

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
 - b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
 - c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
 - d. publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital;
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.
- (5) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.

- (6) Sistem klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas, sebagai berikut:
- a. 000 Umum;
 - b. 100 Pemerintahan;
 - c. 200 Politik;
 - d. 300 Keamanan dan Ketertiban;
 - e. 400 Kesejahteraan;
 - f. 500 Perekonomian;
 - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;
 - h. 700 Pengawasan;
 - i. 800 Kepegawaian;
 - j. 900 Keuangan;

BAB V PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal 7

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
 - a. pengguna internal yang ada di instansi; dan
 - b. pengguna eksternal di luar instansi.

Pasal 8

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:
 - a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Organisasi Perangkat Daerah/instansi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 2. pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
 3. pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub Bidang, Sub Bagian yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
 - b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan

- c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan katagori biasa/terbuka;
 - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
 - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, seperti ketika pihak penegak hukum.

Pasal 9

Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dalam daftar arsip dinamis diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

- a. Lampiran I : kode angka 000 bidang tugas Umum;
- b. Lampiran II : kode angka 100 bidang tugas Pemerintahan;
- c. Lampiran III : kode angka 200 bidang tugas Politik;
- d. Lampiran IV : kode angka 300 bidang tugas Keamanan dan Ketertiban;
- e. Lampiran V : kode angka 400 bidang tugas Kesejahteraan;
- f. Lampiran VI : kode angka 500 bidang tugas Perekonomian;
- g. Lampiran VII : kode angka 600 bidang tugas Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;
- h. Lampiran VIII : kode angka 700 bidang tugas Pengawasan;
- i. Lampiran IX : kode angka 800 bidang tugas Kepegawaian;
- j. Lampiran X : kode angka 900 bidang tugas Keuangan.

Pasal 10

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi arsip dalam ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. katagori arsip biasa/umum/terbuka disimpan pada rak besi;
 - b. katagori arsip terbatas disimpan pada *filling cabinet*; dan
 - c. katagori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.
- (4) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.

- (5) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau petugas kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi arsip.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 12 September 2019
BUPATI PULAU MOROTAI ,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 23



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PULAU MOROTAI

I. UMUM						
NO	KLASIFI KASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	000	UMUM				
	001	Lambang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Garuda - Bendera Kebangsaan - Daerah - Propinsi - Kota/Kabupaten				
	002	Penghargaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Bintang - Satya Lencana - Samkarya Nugraha - Monumen - Penghargaan secara adat - Penghargaan lainnya				

	003	Hari Raya/ Besar - Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb - Keagamaan- Idul Fitri- Natal dll - Hari Ulang Tahun (HUT)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	004	Ucapan - Ucapan Terima kasih - Ucapan Selamat - Ucapan Belasungkawa - Ucapan lainnnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	005	Undangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	006	Tanda Jabatan - Pamong Praja - Tanda Pengenal - Pejabat lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
2	010	URUSAN DALAM				
	011	Gedung Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	012	Rumah Dinas - Tanah untuk rumah dinas - Perabotan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	013	Mess/ Guest House	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	014	Rumah Susun/ Apartemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	015	Penerangan Listrik/ Jasa Listrik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	016	Telepon/Faximili/Internet	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	017	Keamanan / Ketertiban Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	018	Kebersihan Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	019	Protokol - Upacara Bendera - Tata tempat - Pemasangan gambar Presiden dan Waki Presiden - Audiensi - Alamat-alamat Kantor dan Pejabat - Sambutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3	020	PERALATAN -Penawaran, Ekspose	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	021	Alat Tulis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	022	Mesin Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	023	Pejabat Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	024	Alat Angkutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	025	Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	026	Senjata	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	027	Pengadaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	028	Inventaris	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	030	KEKAYAAN DAERAH				
	031	Sumber Daya Alam	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .

	032	Aset Daerah	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	040	PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI				
6	041	Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	042	Dokumentasi - Foto - Audio - Video	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	045	Kearsipan - Pola Klasifikasi - Penataan Berkas - Penyusutan Arsip - Pembinaan Kearsipan - Pemeliharaan/perawatan arsip	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	046	Sandi - Peralatan - Sistem - Sumber Daya Manusia - Pembinaan Persandian	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
	050	PERENCANAAN - REPELITA - Pelita Daerah - Bantuan Pembangunan Daerah - Bappeda - Perencanaan/ Proyek bidang peralatan - Bidang Perpustakaan - Bidang Kearsipan - Bidang Sandi - Organisasi/ Ketatalaksanaan - Penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sub. Bagian, Sub Bidang, Sub Bagian.

	051	Bidang Pemerintahan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	052	Bidang Politik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	053	Bidang Keamanan Ketertiban	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	054	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	055	Bidang Perekonomian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	056	Bidang Pekerjaan Umum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	057	Bidang Penmgawasan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	058	Bidang Kepegawaian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	059	Bidang Keuangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
7.	060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN				
	061	Organisasi pemerintah - Sususnan dan tata kerja - Tata tertib Kantor, jam kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	062	Organisasi Badan Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	063	Organisasi Badan Internasional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	064	Organisasi Semi Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	065	Ketatakasnaan/ tata naskah/Sistem	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	066	Stempel Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	067	Pelayanan Umum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	068	Komputerisasi/Siskomendagri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
8	070	PENELITIAN				
	071	Riset	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	072	Survey	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	073	Kajian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	074	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	075	Departemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	076	Non Departemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	077	Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	078	Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	079	Kecamatan/Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

9	080	KONFERENSI				
	081	Gubernur	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	082	Bupati/Walikota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	083	Komponen eselon lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	084	Instansi Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	085	Internasional di dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	086	Internasional di luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
10	090	PERJALANAN DINAS				
	091	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	092	Perjalanan Menteri ke daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	094	Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

096	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden Keluar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
097	Perjalanan Menteri ke luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
 DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU
 MOROTAI.

II. PEMERINTAHAN

NO	KLASIFI KASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	130	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				
	131	Bupati/wali kota meliputi:				
		- Pencalonan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pengangkatan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pelantikan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pemberhentian	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Serah Terima Jabatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Berita Acara Serah Terima Jabatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Meninggal	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Memori Kepala Daerah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	131	Sambutan/Pengarahan/Amanat	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	132	Wakil Bupati meliputi				
		- Pencalonan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pengangkatan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pelantikan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pemberhentian	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Serah Terima Jabatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Berita Acara Serah Terima Jabatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	133	Sekretaris Daerah Kabupaten meliputi:				
		- Pencalonan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pengangkatan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Meninggal	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Teknis
		- Pelantikan,	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pemberhentian,	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Muspida	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Forum BAN (Badan Anggaran Nasional)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Forum Koordinasi lainnya	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Kerjasama antar Kabupaten/Kota	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Teknis
135	Pembentukan/Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pembentukan Ibukota/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pemberian Dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan.	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
136	Pembagian Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
137	Penyerahan Urusan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

138	Pemerintah Wilayah Kecamatan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Teknis
	Sambutan/Pengarahan/Amanat	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pembentukan Kecamatan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pemekaran Kecamatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pembentukan Perwakilan Kecamatan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
139	Laporan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Monitoring	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Evaluasi	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

2	140	PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN				
	141	Pamong Desa, meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Teknis
	142	Penghasilan Pamong Desa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	143	Kekayaan Desa/kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	144	Dewan Tingkat Desa/kelurahan, Dewan Marga, Rembug Desa/kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	145	Administrasi Desa/kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	146	Kewilayahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/ Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Nama Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kerjasama antar Desa/kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	147	Lembaga-lembaga Tingkat Desa, jangan klasifikasikan di sini, lihat 410 dengan Perinciannya	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	148	Perangkat Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Teknis

		Kepala Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3		Sekretaris Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Staf Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Teknis
	149	Dewan Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rukun Tetangga	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rukun Warga	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	170	DPRD KABUPATEN				
	171	Keanggotaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pencalonan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pengangkatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberhentian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Recall	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pelanggaran	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pergantian Antar Waktu	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	172	Persidangan - Reses	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	173	Kesejahteraan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Keuangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Penghargaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	174	Hak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	180	HUKUM				
		Konstitusi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Dasar hokum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Undang Undang Dasar	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Garis Besar Haluan Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Amnesti, Abolisi, dan Grasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	181	Perdata	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Tanah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rumah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Utang/Piutang	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	Gadai	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Hipotik	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Notariat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
182	Pidana	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
183	Peradilan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Bantuan hokum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
184	Hukum Internasional	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
185	Imigrasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Visa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pasport	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Exit	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Reentry	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Lintas Batas/Batas antar Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	186	Rumah Tahanan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	187	Kejaksaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	188	Peraturan Perundang-undangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5		Peraturan Daerah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Peraturan Kabupaten/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Keputusan Bupati/Walikota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	197	Kerjasama dengan Lembaga Asing	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

III. POLITIK						
NO	KLASIFI KASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	200	POLITIK				
		Kebijakan Umum Orde Baru Reformasi	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	210	KEPARTAIAN meliputi: pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pembubaran	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
		- Lambang Partai - Kartu Tanda Anggota - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART)	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
		- Bantuan keuangan Parpol - Rapat Koordinasi konsolidasi partai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	221	- Berdasarkan Perjuangan - Berkas tentang perjuangan perintis kemerdekaan - Berkas tentang perjuangan angkatan 45 - Berkas tentang perjuangan Veteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	222	Berdasarkan - Kekayaan - Kekayaan - Pepabri Kekayaan Wredatama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	223	- Berdasarkan Kerohanian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja.	Bidang Teknis
	224	- Lembaga Adat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
3	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL				
	231	- Ikatan Dokter Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	232	- Persatuan Guru Republik Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	.233	- Persatuan Sarjana Hukum Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah	Bidang Teknis
	234	- Persatuan Advokat Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	235	- Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah	Bidang Teknis

	236	- Korps Pegawai Republik Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	237	- Persatuan Wartawan Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	238	- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	239	- Organisasi Profesi dan fungsional lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
4	240	ORGANISASI PEMUDA				
	241	- Organisasi Kepemudaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	242	- Organisasi Mahasiswa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	243	- Organisasi Pelajar	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	244	- Organisasi Pemuda Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	250	ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN				
	251	- Organisasi Buruh Nasional	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	252	- Organisasi Buruh Internasional	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	253	- Organisasi Tani	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	254	- Organisasi Nelayan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	255	- Organisasi Angkutan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
6	260	ORGANISASI WANITA				
	261	- Dharma Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	262	- Persatuan Wanita Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	263	- Pemberdayaan Perempuan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	264	- Konggres Wanita	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	265	- Organisasi Wanita Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

7	270	PEMILIHAN UMUM				
	271	- Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	272	- Nomor urut Partai/ Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	273	- Kampanye / Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	274	- Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	275	- Pemilih / Daftar Pemilih	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	276	- Sarana - Sarana T P S - Sarana kendaraan - Surat suara - Kotak suara	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	277	- Pemungutan suara / Penghitungan suara	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	278	- Pengambilan sumpah/janji anggota MPR, DPR, DPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

8	280		PILKADA				
	281	-	Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	282	-	Nomor urut Partai/ Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	283	-	Kampanye / Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	284	-	Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	285	-	Pemilih / Daftar Pemilih	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	286	- - - - -	Sarana Sarana T P S Sarana kendaraan Surat suara Kotak suara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	287	-	Pemungutan suara / Penghitungan suara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	288	-	Pengambilan sumpah/janji anggota MPR DPR DPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	290		KOMISI PEMILIHAN UMUM/ BAWASLU				
9	291	-	Panwaslu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
 DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN						
NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	300	KEAMANAN/KETERTIBAN				
	301	- Polisi Pamong Praja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	302	- Penertiban PKL	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	303	- P S K	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	304	- Gepeng	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	305	- P P N S	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

2	310	PERTAHANAN				
	311	- Darat	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang, Seksi, Sub Bag
	312	- Laut	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	313	- Udara	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	314	- Perbatasan	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
3	320	KEMILITERAN				
	321	- Latihan Militer	terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	322	- Wajib Militer	terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	323	- Operasi Militer	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	324	- Kekayaan ABRI/ TNI	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	325	- Pejabat Sipil dari ABRI/TNI Klasifikasi Dwifungsi ABRI/TNI	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

4	330	KEAMANAN				
	331	- Kepolisian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	332	- Huru hara/ demonstrasi	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	333	- Senjata api/ senjata tajam	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	Bidang Teknis
	334	- Bahan Peledak	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	Bidang Teknis
	335	- Perjudian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	336	- Surat surat Kaleng	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	337	- Pengaduan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	338	- Himbauan / larangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	340	PERTAHANAN SIPIL				
	341	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
6	350	KEJAHATAN				
	351	- Makar / Pemberontakan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	Bidang Teknis
	352	- Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	Bidang Teknis
	353	- Penganiayaan, pencurian dan perampasan	Rahasia	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	Bidang Teknis
	354	- Subversi/Penyelundupan /Narkotika	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	Bidang Teknis

	355	- Pemalsuan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	Bidang Teknis
	356	- Korupsi/Penyelewengan/ Penyalahgunaan Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	357	- Perkosaan/Perbuatan Cabul	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	358	- Kenakalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	359	- Kajahatan Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	360	BENCANA				
	361	- Gunung berapi / gempa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	362	- Banjir / tanah longsor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	363	- Angin Topan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	364	- Kebakaran - Pembinaan, - Penanggulangan, - Pencegahan - Pemadaman - Pengujian instalasi - Antisipasi - Proteksi, APAR - Kebutuhan sarpras	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	365	- Kekeringan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	366	- Tsunami	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

8	370	- KECELAKAAN SAR	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	371	- D a r a t	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	372	- U d a r a	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	373	- L a u t	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	374	- Sungai / danau	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
 AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

V. KESEJAHTERAAN RAKYAT						
NO	KLASIFI KASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	401	Keluarga Miskin	Biasa /Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	402	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Biasa /Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	403	Raskin	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	404	Askeskin	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	405	Jamkessos/Jamkesda	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

2	410	PEMBANGUNAN DESA/KELUARAHAAN				
	411	PEMBINAAN USAHA GOTONG ROYONG				
		a. Swadaya Gotong Royong	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Penataan gotong royong 2) Gotong royong dinamis 3) Gotong royong statis 4) Pungutan				
		b. Lembaga Sosial Desa (LSD)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pembinaan, 2) Klasifikasi, 3) Proyek, 4) Musyawarah desa				
		c. Latihan Kerja Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kader masyarakat, 2) Kuliah Kerja Nyata (KKN), 3) Pusat latihan, 4) Kursus-kursus, 5) Kurikulum/syllabus, 6) Keterampilan, 7) Pramuka				
		d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		f.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Program, 2) Pembinaan organisasi, 3) Kegiatan				
		g.	Penyuluhan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Publikasi, 2) Peragaan, 3) Sosio drama, 4) Siaran pedesaan, 5) Penyuluhan lapangan				
		h	Kelembagaan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Kelompok tani, 2) Rukun tani 3) Subak 4) Dharma Tirta				
412	PEREKONOMIAN DESA			Biasa/Terbuka			
		a.	Produksi Desa		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Pengolahan 2) Pemasaran				
		b.	Kuangan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Perkreditan desa, 2) Inventarisasi data, 3) Perkembangan/pelaksanaan, 4) Bantuan/stimulans 5) Petunjuk/pembinaan pelaksanaan				
		c.	Koperasi Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Badan Usaha Unit Desa (BUUD) 2) Koperasi Unit Desa (KUD)				

		d.	Penataan Bantuan Pembangunan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Jumlah desa yang diberi bantuan, 2) Pengarahan 3) Pusat 4) Daerah				
		e.	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Pusat 2) Daerah				
		f.	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Bantuan langsung, 2) Bantuan keserasian, 3) Bantuan juara lomba desa				
		g.	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			Berkas tentang program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM)				
	413	PRASARANA DESA		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a.	Prasarana Desa 1) Pembinaan 2) Bimbingan teknis				
		b.	Pemukiman Kembali Penduduk 1) Lokasi 2) Diskusi 3) Pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c.	Masyarakat Pradesa 1) Pembinaan 2) Penyuluhan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		d.	Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa				
			1) Rumah sehat, 2) Proyek perintis, 3) Pelaksanaan, 4) Pengembangan 5) Perbaikan kampung	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	414	PENGEMBANGAN DESA					
		a.	Tingkat Perkembangan Desa				
			1) Jumlah desa, 2) Pemekaran desa, 3) Pembentukan desa baru, 4) Evaluasi, 5) Bagan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.	Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)				
			1) Penyuluhan program, 2) Lokasi UDKP, 3) Pelaksanaan, 4) Bimbingan/pembinaan, 5) Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c.	Tata Desa				Bidang
			1) Inventarisasi, 2) Penyusunan pola tata desa, 3) Aplikasi tata desa, 4) Pemetaan, 5) Pedoman pelaksanaan, 6) Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
		d.	Perlombaan Desa				
			1) Pedoman, 2) Penilaian, 3) Kejuaraan, 4) Piagam	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

415	KOORDINASI						
	a.	Sektor Khusus	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
		Berkas tentang koordinasi sector khusus di Pemerintah Kota Yogyakarta					
	b.	Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
		Berkas tentang rapat koordinasi ahorizontal dengan lembaga di lingkungan internal dan eksternal Pemerintah Kota Yogyakarta	Biasa/ Terbuka				
	c.	Tim Koordinasi Pusat (TKP)		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
		Berkas tentang tim koordinasiPusat	Biasa/ Terbuka				
	d.	Kerjasama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
		1) Luar negeri (UNICEF), 2) Perguruan tinggi, 3) Departemen/lembaga non departeman					
	420	PENDIDIKAN					
	421	SEKOLAH					
		a.	Pra Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerj OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.	Sekolah Dasar/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c.	Sekolah Menengah/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	d.	Sekolah Tinggi/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
	e.	Sekolah Kejuruan/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
	f.	Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	

		g.	Kegiatan Pelajar 1. Reuni, darmawisata, 2. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), 3. Pelajar teladan, dan 4. Resimen Mahasiswa (MENWA)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		h.	Sekolah Pendidikan Luar Biasa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		i.	Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	422	ADMINISTRASI SEKOLAH					
		a.	Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran,	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.	Tahun Pelajaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c.	Hari Libur	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d.	Uang Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e.	Bea Siswa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f.	Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	423	METODE BELAJAR					
		a.	Kuliah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.	Ceramah, symposium	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c.	Diskusi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		d.	Kuliah lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tour	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e.	Kurikulum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f.	Karya Tulis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		g.	Ujian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	424		TENAGA PENGAJAR Berkas tentang tenaga pengajar yang meliputi guru, dosen, dekan, rektor dan guru teladan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	425		SARANA PENDIDIKAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a.	Gedung 1) Gedung sekolah, 2) Kampus 3) Pusat kegiatan mahasiswa				
		b.	Buku	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			Berkas tentang buku pelajaran dan diktat kuliah				
		c.	Perlengkapan Sekolah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			Berkas tentang perlengkapan sekolah				

	426	KEOLAHRAGAAN					
		a.	Cabang Olahraga	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.	Sarana 1) Gedung olah raga; 2) Stadion; 3) Lapangan; 4) Kolam renang;	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c.	Pesta Olahraga	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d.	KONI	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	427	KEPEMUDAAN					
		Berkas tentang kepemudaan yang meliputi organaisasi pemuda, kegiatan remaja dan gelanggang remaja		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	428	KEPRAMUKAAN		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	429	PENDIDIKAN KEDINASAN DEPDAGRI		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	430	KEBUDAYAAN		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	431	KESENIAN		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a.	Cabang Kesenian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.	Sarana				
			Berkas tentang Gedung Kesenian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

	432	KEPURBAKALAN				
		a. Museum b. Peninggalan Kuno 1) Candi, termasuk Pemugaran; 2) Benda peninggalan kuno;	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	433	SEJARAH	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	434	BAHASA	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	435	USAHA PERTUNJUKAN, HIBURAN DAN KESENANGAN				
		Berkas tentang Usahan pertunjukan, hiburan dan Kesenangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	436	KEPERCAYAAN				
		Berkas tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	440	KESEHATAN				
	441	PEMBINAAN KESEHATAN				
		a. Gizi; b. Mata; c. Jiwa; d. Kanker; e. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); f. Perawatan; g. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM); h. Pekan Imunisasi Nasional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

	442	OBAT-OBATAN					
		1. Pengadaan 2. Penyimpanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
	443	PENYAKIT MENULAR					
		a. Pencegahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
		b. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
		1) Kusta 2) Kelamin 3) Frambosia 4) TBC/AIDS/HIV					
		c. Epidemilogi dan Karantina (Epidka)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
		1) Kholera; 2) Imunisasi; 3) Surveilense; 4) Rabies/anjing gila, Antraks;					
		d. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	
		1) Malaria; 2) Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF); 3) Filaria; 4) Serangga					

		e.	Hygiene Sanitasi				
			1)Tempat-tempat Pembuatan dan penjualan makanan dan minuman (TPPMM) 2)Sarana air minum dan jamban keluarga (Samijaga) 3)Pestisida	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	444	GIZI					
		a. b. c. d. e. f.	Kekurangan Makanan, Bahaya Kelaparan, Busung Lapar Keracunan Makanan Menu Makanan Rakyat Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	445	RUMAH SAKIT, BALAI KESEHATAN, PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, POLIKLINIK, POSYANDU		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	446	TENAGA MEDIS		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	447	ALAT MEDIS		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	448	PENGOBATAN TRADISIONAL a. Pijat; b. Tusuk jarum; c. Jamu tradisional/herbal; d. Dukun/paranormal		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

6	450		AGAMA				
	451		ISLAM				
		a.	Peribadatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Sholat 2) Zakat, Fitrah 3) Puasa 4) MTQ				
		b.	Rumah Ibadah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c.	Tokoh Agama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d.	Pendidikan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Tinggi; 2) Menengah; 3) Dasar; 4) Pondok Pesantren; 5) Gedung Sekolah; 6) Tenaga Pengajar; 7) Buku; 8) Dakwah; 9) Organisasi/Lembaga Pendidikan 10) TPA/TQA/TPQ				
		e.	Harta Agama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f.	Peradilan	terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		g.	Organisasi Keagamaan Bukan Politik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			Berkas tentang Majelis Ulama Indonesia				

		h	Mazhab	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	452	KRISTEN PROTESTAN					
		a. b. c. d.	Peribadatan Rumah ibadah Tokoh agama, rohaniawan, pendeta, domine Mazhab Organisasi gerejani	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	453	KATHOLIK					
		a. b. c. d. e.	Peribadatan Rumah ibadah Tokoh agama, rohaniawan, pastor, domine Mazhab Organisasi gerejani	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	454	HINDU					
		a. b. c. d. e.	Peribadatan Rumah ibadah Tokoh agama, rohaniawan Mazhab Organisasi Keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	455	BUDHA					
		a. b. c. d. e.	Peribadatan Rumah ibadah Tokoh agama, rohaniawan Mazhab Organisasi Keagamaan				

	456	URUSAN HAJI					
		a.	ONH	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.	Umroh				
		c.	Manasik				
7	460	SOSIAL					
	461	REHABILITASI PENDERITA CACAT		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a.	Cacat Mata	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.	Cacat tubuh				
		c.	Cacat mental				
		d.	Bisu tuli				
	462	TUNA SOSIAL					
		a.	Gelandangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.	Pengemis				
		c.	Tuna susila				
		d.	Anak nakal/anak jalanan				
	463	KESEJAHTERAAN ANAK/KELUARGA					
		a.	Anak Putus Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.	Ibu teladan				
		c.	Keluarga sakinah				
		d.	Anak asuh				
	464	PEMBINAAN PAHLAWAN					
		a.	Pahlawan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.	Perintis kemerdekaan				
		c.	Cacat veteran				

	465	KESEJAHTERAAN SOSIAL		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a. b.	Lanjut Usia Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi				
	466	SUMBANGAN SOSIAL		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a. b. c. d.	Korban Bencana Pencarian Dana untuk Sumbangan Panti Asuhan Panti Jompo				
	467	BIMBINGAN SOSIAL		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			Berkas tentang bimbingan, pendidikan, kesehatan, dan pemukiman untuk				
	468	PMI		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	469	MAKAM		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a. b. c. d.	Umum Pahlawan Khusus keluarga raja Krematorium				
8.	470	KEPENDUDUKAN					
	471	PENDAFTARAN PENDUDUK					
		a.	Identitas Penduduk 1) Biodata 2) Nomor Induk 3) Kartu Tanda Penduduk 4) Kartu Keluarga 5) Advokasi Identitas Penduduk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		b.	Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Perpindahan penduduk WNI 2) Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia 3) Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara 4) Daerah terbelakang 5) Bedol desa				
		c.	Perpindahan Penduduk Antar Negara				
			1) Penduduk Indonesia ke luar negeri 2) Orang asing tinggal sementara 3) Orang asing tinggal tetap 4) Perpindahan penduduk antar Negara di wilayah perbatasan antar Negara (pelintas batas tradisional)	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d.	Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Akibat bencana alam 2) Akibat kerusuhan sosial 3) Pendaftaran penduduk daerah terbelakang 4) Pendaftaran penduduk rentan				

472	PENCATATAN SIPIL		Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	a.	Kelahiran, Kematian, dan Advokasi				
		1) Kelahiran 2) Kematian 3) Advokasi Kelahiran dan Kematian 4) Perkawinan, penceraian dan advokasi				
	b.	Perkawinan Agama Islam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Perkawinan agama non Islam 2) Perceraian agama Islam 3) Perceraian agama non Islam 4) Advokasi perkawinan dan perceraian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	c.	Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta dan Perubahan Pembatalan Akta dan Advokasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pengangkatan anak 2) Pengakuan anak 3) Pengesahan anak 4) Perubahan akta 5) Pembatalan akta 6) Advokasi pengurusan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta				

	b.	Perkawinan Agama Islam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1)Perkawinan agama non Islam 2)Perceraian agama Islam 3)Perceraian agama non Islam 4)Advokasi perkawinan dan Perceraian				
	c.	Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1)Pengangkatan anak 2)Pengakuan anak 3)Pengesahan anak 4)Perubahan akta 5)Pembatalan akta 6)Advokasi pengurusan pengangkatan, pengakuan dna pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta				
	d.	Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1)Akibat perkawinan 2)Akibat kelahiran 3)Non perkawinan 4)Non kelahiran 5)Perubahan WNI ke WNA 6)Perubahan WNA ke WNI				

473	INFORMASI KEPENDUDUKAN					
	a.	Teknologi Informasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Perangkat keras 2) Perangkat lunak 3) Jaringan komunikasi data				
	b.	Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Daerah maju 2) Daerah berkembang 3) Daerah terbelakang				
	c.	Pengolahan Data Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pendaftaran penduduk 2) Kejadian vital penduduk 3) Penduduk non registrasi				
	d.	Pelayanan Informasi Kependudukan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Media elektronik 2) Media cetak 3) Outlet				
474	PERKEMBANGAN PENDUDUK					
	a.	Pengarahan Kuantitas Penduduk	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Struktur jumlah 2) Komposisi 3) Fertilitas 4) Kesehatan reproduksi 5) Morbiditas penduduk 6) Mortalitas penduduk				

		b.	Pengembangan Kuantitas Penduduk	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Anak dan remaja 2) Penduduk usia produktif 3) Penduduk lanjut usia 4) Gender				
		c.	Penataan Persebaran Penduduk	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Migrasi antar wilayah 2) Migrasi internasional 3) Urbanisasi 4) Sementara 5) Migrasi non permanen				
		d.	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Pengembangan sistem perlindungan penduduk 2) Pelayanan kelembagaan ekonomi 3) Pelayanan kelambagaan sosial budaya 4) Partisipasi masyarakat				
		e.	Pengembangan Wawasan Kependudukan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Pendidikan jalur sekolah 2) Pendidikan jalur luar sekolah 3) Pendidikan jalur Masyarakat 4) Pembangunan berwawasan kependudukan				

475		PROYEKSI DAN PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN				
	a.	Indikator Kependudukan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Perumusan penetapan dan pengembangan indikator kependudukan 2) Pemanfaatan indikator kependudukan 3) Sosialisasi indikator kependudukan				
	b.	Proyeksi Penduduk	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan 2) Pemanfaatan proyeksi kependudukan				
	c.	Analisis Dampak Kependudukan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Penyusunan dan pengembangan analisis dampak kependudukan 2) Pemanfaatan analisis dampak kependudukan				
	d.	Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Lembaga internasional; 2) Lembaga masyarakat dan nirlaba; 3) Lembaga usaha swasta				
	e.	Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah 1) Lembaga Internasional 2) Lembaga masyarakat dan nirlaba 3) Lembaga usaha swasta	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		e.	Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah				
			1) Lembaga Pemerintah 2) Pemerintah Provinsi dan 3) Pemerintah Kabupaten	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f	Analisis				
			Berkas tentang analisis proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	476		MONITORING	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	477		EVALUASI	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	478		DOKUMENTASI DAN KEPENDUDUKAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	479		KELUARGA BERENCANA	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
9	480		MEDIA MASSA	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	481		PENERBITAN				
			1) Surat kabar; 2) Majalah; 3) Buku; 4) Penerjemah; 5) Buletin; 6) Jurnal; 7) Kliping;	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	482		RADIO				
			1) RRI 2) Non RRI 3) Radio luar negeri 4) Radio internet	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

483		TELEVISI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) TVRI 2) Swasta lokal, nasional, 3) Luar negeri 4) Televisi internet				
484		FILM	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
485		PERS	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kewartawanan, 2) Wawancara 3) Informasi nasional				
486		GRAFIKA	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang grafika/cetak buku				
487		PENERANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang pameran non Komersil				
488		OPERATION ROOM	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang operation room terkait media massa				
489		HUBUNGAN MASYARAKAT	Biasa/ Terbuka			
		Berkas tentang hubungan masyarakat terkait media		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
 DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

VI. PEREKONOMIAN						
NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	500	PEREKONOMIAN Dewan Stabilisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	501	PENGADAAN PANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	502	PENGADAAN SANDANG	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	503	Perizinan pada umumnya untuk perizinan suatu bidang, klasifikasi pada masalahnya (IMB, SIUP, TDP, HO, TDG)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
2	510	PERDAGANGAN / TATANIAGA - Promosi Perdagangan - Pekan Raya - Iklan - Pameran/Ekspo komersil - Pelelangan - Tera/Timbang - Ulang/Kalibrasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	511	PEMASARAN - Sembilan Bahan Pokok - Pasar Tradisional - Pasar Modern - Pertokoan, Kaki Lima, Kios	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	512	EKSPOR	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	513	IMPOR	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	514	PERDAGANGAN ANTAR PULAU	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	515	PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	516	PERGUDANGAN; TERMASUK TANGKI PENYIMPANAN MINYAK GORING	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	517	ANEKA USAHA PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	518	KOPERASI (UNTUK BUUD, KUD, KUR)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3	520 521	PERTANIAN - Tanaman Pangan - Program - Bimas/Inmas termsuk kredi - Penyuluhan - Produksi - Padi/Panen - Palawija - Jagung - Ketela Pohon/Ubi-ubian - Hortikultura	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	521	-	- Sayuran/Buah-buahan - Tanaman Hias - Pembudidayaan Rumput Laut - Saran Usaha Pertanian - Peralatan - Pembibitan - Pupuk - Perlindungan Tanaman - Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang - Hama-hama serangga, wereng, Walang sangit, tungro, hama tikus dan sejenisnya - Pemberantasan hama, meliputi : penyemprotan, penyiangan, geropyokan, sprayer, pemberantasan melalui udara - Pestisida - Tanah Pertanian Pangan - Persawahan - Perladangan - Kebun - Rumpon Ikan Laut - KTA/Lahan Kritis - Pengusaha Petani - Bina Usaha - Pasca Panen - Pemasaran Hasil - Kelompok tani	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
--	-----	---	--	---------------	------------	---	---------------

	522	KEHUTANAN					
		-	Program - Hak Pengusahaan Hutan - Tata Guna Hutan - Perpetaan Hutan - Tumpangsari - Produksi - Kayu - Non Kayu - Sarana Usaha Kehutanan - Penghijauan, Reboisasi - Kelestarian - Cagar Alam, Margasatwa, Suaka Margasatwa - Berburu, meliputi larangan dan izin berburu - Kebun Binatang - Konservasi Lahan - Penyakit/Hama - Jenis-jenis hutan - Hutan Hidup - Hutan Wisata - Hutan Produksi - Hutan Lindung	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis Bidang Teknis

523	-	PERIKANAN - Program - Penyuluhan - Teknologi - Produksi - Pelelangan - Usaha Perikanan - Pembibitan - Daerah Penangkapan - Pertambakan, meliputi : tambak ikan deras, tambak udang dan lain-lain - Sarana - Peralatan - Kapal - Pelabuhan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
524	-	PETERNAKAN - Produksi - Susu ternak rakyat - Telur - Daging - Kulit - Sarana Usaha Ternak - Pembibitan - Kandang ternak - Kesehatan Hewan - Penyakit Hewan - Pos Kesehatan Hewan - Tesi Pullorum - Karantina - Pemberantasan Penyakit Hewan termasuk upaya pencegahannya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

			- Perunggasan - Pengembangan Ternak - Inseminasi Buatan - Pembibitan/Bibit Unggul - Penyebaran Ternak - Makanan Ternak - Tempat Pemotongan Hewan - Data Peternakan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	525	-	PERKEBUNAN - Program - Produksi - Karet - The - Tembakau - Tebu - Cengkeh - Kopra - Kopi - Cokelat - Aneka Tanaman	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	4	530	- PERINDUSTRIAN - Undang-Undang Gangguan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		531	- INDUSTRI LOGAM	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		532	- INDUSTRI MESIN/ELEKTRONIK	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		533	- INDUSTRI KIMIA/FARMASI	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	534	-	INDUSTRI TEKSTIL	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	535	-	INDUSTRI MAKANAN/MINUMAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	536	-	ANEKA INDUSTRI/PERUSAHAAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	537	-	ANEKA KERAJINAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	538	-	USAHA NEGARA/BUMN - Perusahaan Jawatan - Perusahaan Umum - Persero/PT, CV, UD, Firma	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	539	-	PERUSAHAAN DAERAH/BUMD	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	540		PERTAMBANGAN/KESAMUDERAAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	541	-	BBM	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	542	-	GAS BUMI - Eksploitasi/Pengeboran - Kontrak Kerja - Pengolahan Tangki, Pompa Tanker	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	543	-	LOGAM MULIA - Emas - Intan/Batu Mulia - Perak	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	544	-	LOGAM - Timah - Aluminium, Boxit - Besi, termasuk besi tua - Tembaga	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	545	-	ANEKA TAMBANG - Batu Bara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	546	-	GEOLOGI - Vulkanologi - Pengawasan Gunung Berapi - Sumur Artesis, air Bawah Tanah	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	547	-	HIDROLOGI	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	548	-	KESAMUDERAAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
6	550	-	PERHUBUNGAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	551	-	PERHUBUNGAN DARAT				
			- Lalulintas Jalan Raya, Sungai, Danau - Keamanan Lalulintas, rambu-rambu - Angkutan Jalan Raya - Perizinan - Alat angkutan - Terminal - Perkeretaapian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	554	-	POS	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	555	-	TELEKOMUNIKASI - Telepon, HT - Telegram - Telex/SSB, Faximile - Satelit, Internet - Stasiun Bumi, Parabola - Menara Telekomunikasi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	556	-	PARIWISATA DAN REKREASI - Obyek Kepariwisataaan - Perhotelan - Travel Service - Tempat Rekreasi - Tempat sejarah/monumen	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	557	-	METEOROLOGI - Ramalan Cuaca - Curah Hujan - Kemarau Panjang	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
			TENAGA KERA				
7	560	-	TENAGA KERJA - Pengangguran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	561	-	UPAH	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	562	-	PENEMPATAN TENAGA KERJA, TKI - Outsourcing	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	563	-	LATIHAN KERJA, MAGANG	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	564	-	Tenaga Sukarela	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	565	-	Perselisihan Perburuhan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	566	-	Keselamatan Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	567	-	Pemutusan Hubungan Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	568	-	Kesejahteraan Buruh (Kesehatan, Perumahan, dll.)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	569	-	Tenaga Orang Asing	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
			PERBANKAN / MONETER				
8	570	-	Permodalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	571	-	Modal Domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

	572	-	Modal Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	573	-	Modal Patungan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	574	-	Pasar Uang dan Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	575	-	Saham	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
9	580	-	Perbankan/Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	581	-	Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	582	-	Investasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	583	-	Deposito	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

	584	-	Bank Pembangunan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	585	-	Asuransi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	586	-	Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	587	-	Fiskal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	588	-	Hutang Negara, Obligasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	589	-	Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
10	590	-	Agraria	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	591	-	Tata Guna Tanah - Pemetaan dan Pengukuran - Perpetaan - Penyediaan Data - Fatwa Tata Guna Tanah - Tanah Kritis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

	592	-	Landreform - Redistribusi - Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan - Penentuan Tanah Obyek Landreform - Pembagian Tanah Obyek Landreform - Sengketa Redistribusi - Tanah Obyek Landreform - Ganti Rugi - Ganti Rugi Tanah Kelebihan, meliputi Sengketa ganti rugi tanah kelebihan - Ganti Rugi Tanah Absentee, meliputi Sengketa ganti rugi tanah absentee - Ganti Rugi Tanah Partikelir, meliputi Sengketa ganti rugi tanah partikelir - Bagi Hasil - Penetapan Imbangan Bagi Hasil - Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil - Sengketa Perjanjian Bagi Hasil - Gadai Tanah - Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah - Pelaksanaan Gadai Tanah - Sengketa Gadai Tanah - Bimbingan dan Penyuluhan - Pengembangan - Yayasan Dana Landreform (YDL)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	593	-	Pengurusan Hak-hak Tanah - Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis - Sewa Tanah - Sewa Tanah untuk Tanaman tertentu; tebu, tembakau, rosella, corchorus - Hak Milik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

		- Perorangan - Badan Hukum - Hak Pakai - Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI) - Perseorangan, Warga Negara Asing (WNA) - Badan Hukum - Badan Hukum Indonesia - Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor Dagang Asing - Tanah Gedung-gedung Negeri - Guna Usaha - Perkebunan Besar - Perkebunan Rakyat - Peternakan - Perikanan - Kehutanan - Hak Guna Bangunan - Perorangan - Badan Hukum - P3MB (Panitia Penguasaan Milik Belanda) - Badan Hukum Asing Belanda-PRK No.5165 - Pemulihan Hak (PerPres 4/1960) - Hak Pengelolaan - PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate - Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan - Sengketa Tanah - Peradilan Perkara Tanah (lihat klasifikasi 183) - Pencabutan dan Pembebasan Tanah - Pencabutan Hak - Pembebasan Tanah - Ganti Rugi Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
--	--	--	----------	------------	---	---------------

594	-	Pendaftaran Tanah - Pengukuran/Pemetaan - Fotogrametri - Terristis - Triangulasi - Peralatan - Dana Pengukuran (PerMen Agraria No.61/1965) - Sertifikat - Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) - Ajudikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
595	-	Lahan Transmigrasi - Tata Guna Tanah - Landreform - Pengurusan Hak-hak Tanah - Pendaftaran Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
596	-	- Tanah kosong	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
 DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

VII. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

NO	KLASIFIKASI		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Tata Bangunan Konstruksi, dan Industri Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang teknis
	602	Kontraktor Pemborong - Tender / lelang - Penunjukan langsung - Prakuualifikasi - Daftar Rekanan Mampu (DRM) - Tanda Daftar Rekanan (TDR)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	603	Arsitektur	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memilik dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	604	Bahan Bangunan - Tanah dan batu - Aspal, Aspal buatan, Aspal alam - Besi dan logam lainnya - Besi beton - Besi profil - Paku - Alumunium, - - profil	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		- Bahan-bahan perlindungan dan pengawet - Semen - Kayu seperti balok, papan, dolken - Bahan penutup atap - Alat-alat penggantung dan pengunci - Bahan-bahan bangunan lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	605	Instalasi - Instalasi bangunan - Instalasi listrik - Instalasi air sanitasi - Instalasi pengatur udara - Instalasi akustik - Instalasi cahaya / penerangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	606	Konstruksi Pencegahan - Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran - Konstruksi pencegahan terhadap gempa - Konstruksi pencegahan terhadap angin udara - Konstruksi pencegahan terhadap kegaduhan - Konstruksi pencegahan terhadap gas/explosive - Konstruksi pencegahan terhadap serangga	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
2	610	Irigasi - Bangunan waduk * Bendungan * Tanggul * Pelimpahan banjir * Menara pengambilan -	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		Bangunan pengambilan - Bendungan - Bendungan dengan pintu bilas - Bendungan dengan pompa - Pengambilan bebas - Pengambilan bebas dengan pompa - Sumur dengan pompa - Kantong lumpur - Silt ekstraktor - Escape Channel - Bangunan pembawa - Saluran - Bangunan - Box Tersier - Got miring - Talang - Syphon - Gorong-gorong - Pelimpah samping - Bangunan Pembuang - Saluran - Bangunan - Gorong-gorong pembuang - Talang pembuang - Syphon pembuang - Bangunan lainnya - Jalan - Jembatan - Tangga cuci - Kubangan kerbau - Waduk lapangan - Bangunan penunjang - Jaringan telepon - Stasiun agro	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
--	--	---	---------	------------	--	---------------

611	Folder: - Tanggul keliling - Tanggul - Bangunan penutup sungai - Jembatan - Bangunan pembawa - Saluran - Stasiun pompa pemasukan - Bangunan bagi - Gorong-gorong - Syphon - Bangunan pembuang - Stasiun pompa pembuang - Saluran - Pintu air pembuangan - Gorong-gorong pembuangan - Syphon pembuangan - Bangunan lainnya - Bangunan - Rumah petugas eksploitasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
612	Pasang Surut - Bangun pembawa - Saluran - Bangunan pintu pemasukan - Bangunan pembuang - Saluran - Bangunan pintu pembuang - Bangunan lainnya - Kolam pasang - Saluran - Bangunan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	613	Pengendalian Sungai - Bangunan pengaman - Tanggul banjir - Pintu pengatur banjir - Klep pengatur banjir - Tembok pengaman talud - Krib - Kantung lumpur - Chek-dam - Syphon - Saluran pengaman - Saluran banjir - Saluran drainage - Corepure - Bangunan lainnya - Warning system - Stasiun	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	614	Pengamanan Pantai - Tanggul - Krib - Bangunan lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	615	Air Tanah - Stasiun pompa - Bangunan pembawa - Bangunan pembuang - Bangunan lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
3	620	Jalan Kota - Daerah penguasaan - Tanah - Tanaman - Bangunan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		- Bangunan sementara - Jalan sementara - Jembatan sementara - Kantor proyek - Gudang proyek - Barak kerja - Laboratorium lapangan - Rumah - Badan jalan - Pekerjaan tanah - Stabilitas - Perkerasan - Lapis pondasi bawah - Lapis pondasi - Lapis permukaan - Drainage - Parit tanah - Gorong-gorong - Buku Trotuir - Tanah - Perkerasan - Pasangan - Median - Tanah - Tanaman - Perkerasan - Pasangan - Daerah samping - Tanaman - Pagar	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
--	--	--	---------	------------	--	---------------

		- Bangunan pelengkap dan pengamanan - Rambu-rambu/ tanda lalu lintas - Lampu penerangan - Lampu pengatur lalu lintas - Patok-patok KM - Patok-patok ROW (Sempadan) - Rel pengamanan - Pagar - Turap, penahan - Bronjong	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	621	Jalan Luar Kota - Daerah penguasaan - Tanah - Tanaman - Bangunan - Bangunan sementara - Jalan sementara - Jembatan sementara - Kantor proyek - Gedung proyek - Barak kerja - Laboratorium lapangan - Rumah - Badan jalan - Pekerjaan tanah - Stabilisasi - Perkerasan - Lapis pondasi - Lapis pondasi bawah - Lapis permukaan - Drainage - Parit - Gorong-gorong - Sub drainage	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		- Trotoar - Tanah - Perkerasan - Median - Tanah - Tanaman - Perkerasan - Pasangan - Daerah samping - Tanaman - Pagar - Bangunan perlengkap dan pengamanan - Rambu-rambu / Tanda lalu lintas - Lampu penerangan - Lampu lalu lintas - Patok-patok KM - Patok-patok ROW - Rel-rel pengaman - Pagar - Turap pengaman - Bronjong				
	623	Jalan Layang	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
4	630	Jembatan pada Jalan Kota - Daerah penguasaan - Tanah - Tanaman - Bangunan	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		- Bangunan sementara - Jalan sementara - Jembatan sementara - Kantor proyek - Gudang proyek - Barak kerja - Laboratorium lapangan - Rumah - Pekerjaan tanah - Galian tanah - Timbunan tanah - Pondasi - Pondasi kepala jalan - Pondasi pilar - Angker - Bangunan bawah - Kepala jembatan - Pilar - Piloan - Landasan - Bangunan - Gelagar - Lantai - Perkerasan - Jalan orang/Trotoar - Sandaran - Talang air - Bangunan/pengaman - Turap/penahan - Bronjong - Strek dam - Kist dam - Corepure - Krib				
--	--	---	--	--	--	--

		- Bangunan pelengkap - Rambu-rambu / Tanda lalu lintas - Lampu penerangan - Lampu lalu lintas - Patok-patok KM - Patok-patok ROW - Rel-rel pengaman - Pagar - Oprit - Badan - Perkerasan - Drainage - Baku - Median				
	632	Jembatan pada Jalan Luar Kota - Daerah penguasaan - Tanah - Tanaman - Bangunan - Bangunan sementara - Jalan sementara - Jembatan sementara - Kantor proyek - Gudang proyek - Barak kerja - Laboratorium lapangan - Rumah - Pekerjaan tanah - Galian tanah - Timbunan tanah	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	- Pondasi - Pondasi kepala jalan - Pondasi pilar - Angker - Bangunan bawah - Kepala jembatan - Pilar - Piloan - Landasan - Bangunan atas - Gelagar - Lantai - Perkerasan - Jalan orang/Trotoar - Sandaran - Talang air - Bangunan pengaman - Turap/penahan - Bronjong - Strek dam - Kist dam - Corepure - Krib - Bangunan pelengkap - Rambu-rambu / Tanda lalu lintas - Lampu penerangan - Lampu lalu lintas - Patok-patok KM - Patok-patok ROW - Rel-rel pengaman - Pagar				
--	---	--	--	--	--

		- Oprit - Badan - Perkerasan - Drainage - Baku - Median				
5	640	Bangunan Pemerintah - Gedung pengadilan - Rumah pejabat Negara - Gedung DPR - Gedung Balaikota - Penjara - Perkantoran - Rumah Dinas	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	642	Bangunan Pendidikan - Taman kanak-kanak - SD dan Sekolah Menengah - Perguruan Tinggi - Tempat Kursus/Lembaga Pendidikan - Tempat Diklat	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	643	Bangunan Rekreasi - Bangunan Olah Raga - Gedung Kesenian - Gedung Pemancar	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	644	Bangunan Perdagangan - Pusat Perbelanjaan (Pasar, Mall, Supermarket, dept.Store) - Gedung Perdagangan - Bank	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

645	Bangunan Pelayanan Umum - Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum - Gedung Parkir - Rumah Sakit / Puskesmas - Gedung Telkom - Terminal Angkutan Udara - Terminal Angkutan Air - Terminal Angkutan darat - Bangunan Keagamaan - Halte/Shelter	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
646	Bangunan Peninggalan Sejarah - Monumen - Candi - Keraton - Rumah Tradisional - Heritage	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
647	Bangunan Industri	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
648	Bangunan Tempat Tinggal - Rumah Perkotaan - Inti/Sederhana - Sedang/Mewah - Rumah Susun - Rumah Pedesaan - Rumah Contoh - Real Estate	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	649	Elemen Bangunan - Pondasi - Di atas tiang - Dinding - Penahan beban - Tidak menahan beban - Atap - Lantai/Langit-langit - Suspended - Solit - Pintu/Jendela - Pintu Harmonik - Pintu biasa - Pintu sorong - Pintu kayu - Jendela sorong - Jendela vertical	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
6	650	Tata Kota Daerah Perdagangan/Pelabuhan - Daerah pusat perbelanjaan - Daerah perkotaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	651	Daerah Pemerintah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	653	Daerah Perumahan - Kepadatan rendah - Kepadatan tinggi - Kepadatan rendah - Kepadatan tinggi	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

654	Daerah Industri - Industri berat - Industri ringan - Industri rumah	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
655	Daerah Rekreasi - Taman kota - Tempat olah raga dan bermain - Ruang terbuka	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
656	Transportasi - Jaringan jalan - Penerangan jalan - Jaringan kereta api - Jaringan sungai	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
657	Assainering - Saluran pengumpulan - Instalasi pengolahan - Bangunan - Unit Desinfektan - Unit Perpompaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
658	Kesehatan Lingkungan - Persampahan - Bangunan pengumpul - Bangunan pemusnahan - Pengotoran Udara - Pengotoran Air - Air buangan industri - Kegaduhan/Polusi Suara - Kebersihan Kota	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

7	660	Tata Lingkungan Daerah Hutan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	662	Daerah Pertanian	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	663	Daerah Pemukiman	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	664	Pusat Pertumbuhan	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	665	Transportasi - Jaringan jalan - Jaringan kereta api - Jaringan sungai	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
8	670	Ketenagaan Listrik - Kelistrikan - Kelistrikan PLN - Kelistrikan non PLN - Pembangkit tenaga listrik	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		- PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) - PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) - PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) - PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari) - PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) - PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) - PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) - Transmisi tenaga listrik - Gardu induk/gardu penghubung/gardu trafo - Saluran udara tegangan tinggi - Kabel bawah tanah - Distribusi tenaga listrik - Gardu distribusi - Tegangan rendah - Tegangan menengah - Jaringan bawah tanah - Pengusahaan listrik - Sambungan listrik - Penjualan tenaga listrik - Tarif listrik				
672	Tenaga Air		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	673	Tenaga Minyak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	674	Tenaga Matahari	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	675	Tenaga Uap	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	676	Tenaga Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
9	680	Peralatan	Terbuka	Eselon III	Tidak mMemiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
10	690	Air Minum Intake - Broncaptering - Sumur - Bendungan - Saringan - Pintu air - Saluran pembawa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		- Alat ukur - Perpompaaan				
	692	Tranmisi Air Baku - Perpipaan - Katup Udara - Katup Penguras - Bak pelepas tekanan - Jembatan pipa - Syphon	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	693	Instalasi Pengelolaan - Bangunan Ukur - Bangunan Aerasi - Bangunan Pengendapan - Bangunan pembubuh bahan kimia - Bangunan pengaduk - Bangunan saringan - Perpompaaan - Clear Hell	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	694	Distribusi - Reservoir Menara Bawah Tanah - Menara - Reservoir di bawah tanah - Perpipaan - Perpompaaan - Jembatan Pipa - Syphon - Hydran - Hydran umum - Hydran kebakaran	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		- Katup - Katup udara - Katup pelepas - Bak Pelepas Tekanan				
--	--	--	--	--	--	--

BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
 AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

VIII. PENGAWASAN						
NO	KLASIFIKASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	PWS/PENGAWASAN					
	700	- Monitoring,Pemeriksaan, Audit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	701	- Bidang Urusan Dalam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	702	- Bidang Peralatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	703	- Bidang Kekayaan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	704	- Bidang Perpustakaan/ Dokumentasi/Kearsipan/Sandi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis

	705	- Bidang Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	707	- Bidang Penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	708	- Bidang Konferensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	709	- Bidang Perjalanan Dinas	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
2.	710	BIDANG PEMERINTAHAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	711	- Bidang Pemerintahan Pusat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis
	712	- Bidang Pemerintahan Propinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis
	713	- Bidang Pemerintahan Kabupaten /Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis
	714	- Bidang Pemerintahan Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis
	715	- Bidang MPRIDPR	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis
	716	- Bidang DPRD Propinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis

	717	- Bidang DPRD Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	718	- Bidang Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	719	- Bidang Hubungan Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
3	720	BIDANG POLITIK				
	721	- Bidang Kepartaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	722	- Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit Kerja	Bidang Teknis
	723	- Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	724	- Bidang Organisasi Pemuda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	725	- Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	726	- Bidang Organisasi Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis
	727	- Bidang Pemilihan Umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis

4	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	731	- Bidang Pertahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	732	- Bidang Kemiliteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	733	- Bidang Perlindungan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	734	- Bidang Keamanan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	735	- Bidang Kejahatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	736	- Bidang Bencana	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	737	- Bidang Kecelakaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	741	- Bidang Pembangunan Desa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	742	- Bidang Pendidikan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	743	- Bidang Kebudayaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	744	- Bidang Kesehatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	745	- Bidang Agama	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	746	- Bidang Sosial	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	747	- Bidang Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	748	- Bidang Media Masa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
6	750	BIDANG PEREKONOMIAN	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	751	- Bidang Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	752	- Bidang Pertanian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	753	- Bidang Perindustrian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	754	- Bidang Pertambangan/Kesamudraan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	755	- Bidang Perhubungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	756	- Bidang Tenaga Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	757	- Bidang Permodalan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	758	- Bidang Tentang Perbankan / Moneter	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	759	- Bidang Tentang Agraria	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	761	- Bidang Pengairan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	762	- Bidang Jalan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis
	763	- Bidang Jembatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis
	764	- Bidang Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis
	765	- Bidang Tata Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis

	766	-	Bidang Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	767	-	Bidang Ketenagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	768	-	Bidang Peralatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	769	-	Bidang Air Minum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
8	780		BIDANG KEPEGAWAIAN				
	781	-	Bidang Pengadaan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	782	-	Bidang Mutasi Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	783	-	Bidang Kedudukan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis
	784	-	Bidang Kesejahteraan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis
	785	-	Bidang Cuti	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah	Bidang Teknis
	786	-	Bidang Penilaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit	Bidang Teknis

	787	-	Bidang Tata Usaha Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	788	-	Bidang Pemberhentian Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	788	-	Bidang Pendidikan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
9	790		BIDANG KEUANAGAN				
	791	-	Bidang Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	792	-	Bidang Otorisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	793	-	Bidang Verifikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	794	-	Bidang Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	795	-	Bidang Perbendaharaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	796	-	Bidang Pembinaan Kebendaharaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	797	-	Bidang Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	799	-	Bidang Perbendaharaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

BUPATI PULAU MOROTAI,

BENNY LAOS

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 23 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN AKSES
 DAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PULAU MOROTAI

X. KEUANGAN						
NO	KLASIFI KASI	J E N I S A R S I P	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	901	Nota Keuangan - Berkas pengantar nota keuangan APBD perubahan	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	902	APBN	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	903	APBD, RAPBD -Hibah -Bantuan Sosial	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	904	Dana Alokasi Umum - Berks pengajuan - Penyusunan DAU - Laporan	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	905	Dana Alokasi Khusus - Berkas pengajuan - Penggunaan DAK - Laporan - Dana Bagi hasil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	906	Dana Cadangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	907	Penetapan dan prioritas plafon anggaran, penetapan prioritas anggaran sementara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	908	Kebijakan alokasi umum, nota kesepakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
2	910	ANGGARAN				
	911	Rutin/Murni - APBD murni mulai dari perencanaan program di DPRD sampai penetapan perda APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	912	Pembangunan/Kegiatan - Pengusulan anggaran - pembiayaan/kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	913	Anggaran Belanja Tambahan/Anggaran Perubahan APBD - Mulai dari perencanaan sampai penetapan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	914	Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) - Daftar Usulan Kegiatan (DUK) - Pengusulan Pra RKA - Pengusulan RKA	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	915	Daftar Isian Proyek (DIP)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Daftar Usulan Proyek (DUP) - Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	916	Revisi Anggaran/Penyempurnaan APBD - Pengusulan realisasi APBD -	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	917	Pembiayaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	918	Belanja langsung/tidak langsung	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
3	920	OTORISASI/SKO/Surat Penyediaan Dana (SPD)				
	921	Rutin/Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	922	Pembangunan/Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	923	SIAP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	924	Ralat SKO/Revisi Surat Penyediaan Dana (SPD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
4	930	VERIFIKASI				
	931	SPM Rutin (Daftar P8)/SPM Murni, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	932	SPM Pembangunan (Daftar P8)/SPM Kegiatan, Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D)Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	933	Penerimaan (Daftar P6. P7)/Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	934	SPJ Rutin/SPJ Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	935	SPJ Pembangunan/SPJ Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	936	Nota Pemeriksaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	937	SP Pemindahan Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
5	940	PEMBUKUAN				
	941	Penyusunan Perhitungan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	943	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) - Neraca - Catatan anggaran laporan keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
6	950	PERBENDAHARAAN				
	951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)/Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	952	Tuntutan Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	953	Penghapusan Kekayaan Negara - Aset Daerah - Aset bergerak - Aset tidak bergerak - Aset tidak berwujud	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretaria, Bidang
	954	Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek / PPTK dan Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	955	Specimen Tanda Tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	956	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	957	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
7	960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN				
	961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Sekretaria, Bidang
	962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat	Sekretariat, Bidang
	963	Laporan Keuangan Bendaharawan - Laporan keuangan bulanan - Laporan keuangan tahunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

8	970	PENDAPATAN - Pendapatan asli daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	971	Perimbangan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	972	Subsidi	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	973	Pajak, Ipeda, IHH, IHPH, PBB	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	974	Retribusi	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	975	Bea	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	976	Cukai	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	977	Pungutan	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	978	Bantuan Presiden, Menteri, Bantuan Propinsi, Bantuan Pemerintah, dan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
9	979	Pendapatan Perusahaan Milik Negara/Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	980	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

10.	990	BENDA HARAWAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	991	SKPP/SPP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	992	Teguran SPJ	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS



